

Evaluasi tingkat transparansi pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Rantau Selatan

Taraweh Harahap

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Labuhan Batu
Awe8130@gmail.com

Abstract

Micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) in the food and beverage industry in Rantau Selatan District will have their ESG reporting transparency assessed in this study. Waste management, employee welfare, and corporate governance are some of the sustainability factors that MSME participants in the supply chain disclose. Data for the study came from in-depth interviews, field observations, and document analysis; the methodology used was descriptive qualitative. We anticipate that the findings will show how well MSME actors grasp the significance of ESG reporting and what variables impact the disclosure of sustainability information by these actors. Local governments and MSME support institutions might use the findings to inform policy-making about the local culinary sector's transparency and sustainability.

Keywords: ESG, Transparency, Supply Chain

Abstrak

Dalam studi ini, usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor makanan dan minuman di Kabupaten Rantau Selatan akan dinilai transparansi pelaporan ESG-nya. Pengelolaan limbah, kesejahteraan karyawan, dan tata kelola perusahaan merupakan beberapa faktor keberlanjutan yang terungkap dari aktivitas rantai pasokan UKM. Dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, metodologi kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data. Hasil yang diprediksi akan menunjukkan seberapa baik UKM memahami nilai pelaporan ESG dan variabel apa yang memengaruhi kesediaan mereka untuk memberikan data keberlanjutan. Hasil studi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan organisasi pendukung UKM dalam merumuskan kebijakan yang akan meningkatkan keberlanjutan dan keterbukaan bisnis makanan lokal.

Kata Kunci: ESG, Transparansi, Rantai Pasok

I. PENDAHULUAN

Faktor kunci dalam mengevaluasi tanggung jawab sosial dan keberlanjutan suatu perusahaan adalah bagaimana perusahaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) (Sakti, 2024). Fondasi ekonomi Indonesia, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tunduk pada prinsip-prinsip ESG yang sama dengan perusahaan besar dengan persyaratan pelaporan resmi. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mengadopsi metode bisnis yang baik bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik seiring dengan meningkatnya kesadaran dunia

akan kebutuhan akan keberlanjutan. Namun, memahami aktivitas ESG, menerapkannya dalam praktik, dan melaporkannya secara jelas dan terorganisir merupakan berbagai hambatan yang harus diatasi oleh UMKM.

Salah satu wilayah di Kabupaten Labuhan Batu yang mengalami pertumbuhan pesat di sektor UMKM adalah Kecamatan Rantau Selatan, khususnya di sektor pangan. Pemasok bahan baku, tenaga kerja lokal, dan konsumen hanyalah sebagian kecil dari banyak pemangku kepentingan dalam kegiatan produksi sektor ini. Akibatnya, pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sangat terkait erat dengan industri pangan. Meskipun demikian, sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah ini terus menggunakan metode manajemen perusahaan yang kuno, yang tidak mencakup pelaporan atau dokumentasi sistematis apa pun terkait keberlanjutan. Yang menjadi perhatian utama adalah sejauh mana UMKM telah mengakui pentingnya prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan seberapa terbuka mereka mengungkapkan inisiatif keberlanjutan di seluruh rantai pasokan (Indonesia, 2025).

Penelitian di bidang ini bertujuan untuk menilai seberapa terbuka UMKM di Kabupaten Rantau Selatan dalam melaporkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasokan pangan mereka. Kami ingin mengetahui seberapa terbuka UMKM pangan di daerah tersebut mengenai pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), variabel apa yang memengaruhi pengungkapan data keberlanjutan, dan taktik apa yang dapat diterapkan pada kemampuan UMKM lokal untuk meningkatkan pelaporan ESG. Karena pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) memengaruhi kredibilitas perusahaan, posisi pasar, dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan, penelitian ini sangat penting. Selain memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasokan yang berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan kesadaran dan keterbukaan dalam pelaporan ESG juga dapat meningkatkan kepercayaan di antara konsumen dan mitra bisnis.

Secara teoritis, studi ini menambah literatur ESG yang berkembang yang berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), suatu bidang yang jauh lebih sedikit mendapat perhatian dibandingkan studi tentang perusahaan besar. Pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM dapat menggunakan temuan penelitian untuk membuat kebijakan pelaporan ESG, pelatihan, atau rekomendasi yang spesifik untuk kebutuhan dan keterampilan pemilik usaha kecil. Yang unik dari studi ini adalah penekanannya pada UMKM makanan di Distrik Rantau Selatan, sebuah wilayah mikro yang sejauh ini belum banyak diteliti secara khusus mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Selain melihat implementasi ESG, studi ini juga menilai transparansi pelaporan rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman barang jadi kepada pelanggan.

Menurut survei sebelumnya, mayoritas analisis ESG masih berpusat pada perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial untuk menyusun laporan keberlanjutan. Namun, studi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

sebagian besar mengabaikan metode pelaporan aktual dan lebih memilih untuk menyelidiki persepsi atau kesadaran pelaku bisnis. Studi ini mengatasi kekosongan pengetahuan dengan melakukan investigasi empiris tentang tingkat keterbukaan dalam pelaporan ESG oleh UMKM lokal. Dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses produksi, pengelolaan limbah, dan hubungan kerja, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneliti sepuluh UMKM makanan di Kabupaten Rantau Selatan. Mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam model mereka, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, data yang dikumpulkan dievaluasi.

Berdasarkan temuan, UMKM pangan di Kabupaten Rantau Selatan memiliki tingkat keterbukaan yang sangat baik dalam hal pelaporan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Perusahaan memahami pentingnya keberlanjutan dalam segala bentuknya, tetapi terutama terkait dengan masalah sosial dan lingkungan termasuk pengelolaan limbah organik, penggunaan produk lokal, dan menjaga hubungan positif dengan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih kekurangan kerangka pelaporan dan dokumentasi yang sistematis dalam hal tata kelola. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaku korporasi telah menerapkan konsep ESG, meskipun belum melalui pelaporan yang terstandarisasi.

Baik akademisi maupun pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat dari saran penelitian untuk meningkatkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sektor UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun program pelatihan yang lebih mudah dipahami untuk pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan mendorong budaya yang lebih terbuka di kalangan UMKM di wilayah Rantau Selatan. Dengan demikian, studi ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat penggunaan prinsip-prinsip berkelanjutan di sektor UMKM (pemain kunci dalam pembangunan ekonomi regional).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori ESG (Environmental, Social, and Governance)

Untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam hal keberlanjutan secara keseluruhan, seseorang dapat melihat kinerja ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola). Selain mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, ESG juga menunjukkan reputasi dan daya saing jangka panjangnya (Frias-Aceituno dkk., 2022).

- a. Aspek Lingkungan (Environmental) Membahas cara-cara perusahaan mengendalikan dampak lingkungannya, termasuk konsumsi sumber daya, pembuangan sampah, dan emisi karbon.
- b. Aspek Sosial (Social) Mencakup tanggung jawab kepada konsumen dan mitra bisnis serta interaksi dengan karyawan dan masyarakat luas.

- c. Aspek Tata Kelola (Governance) Menekankan perlunya keterbukaan, kejujuran, dan metode yang adil dalam pengambilan keputusan dalam manajemen perusahaan.

Dalam hal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), implementasi ESG seringkali tidak resmi dan kurang terdokumentasi. Usaha kecil dan menengah (UMKM) memprioritaskan operasional sehari-hari daripada pelaporan non-keuangan (Sari, 2021). Manajemen tenaga kerja yang adil, keramahan lingkungan, dan keterbukaan data perusahaan adalah beberapa cara mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG.

Transparansi Pelaporan ESG

Keterbukaan organisasi dalam mengkomunikasikan informasi keberlanjutan yang relevan, akurat, dan dapat diverifikasi kepada pemangku kepentingan ditandai sebagai transparansi dalam pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (GRI, 2023). Selain berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di luar organisasi, laporan keberlanjutan membantu evaluasi internal dan pengambilan keputusan strategis.

Global Reporting Initiative (2023) menemukan bahwa pelanggan dan investor lebih cenderung percaya pada perusahaan yang melaporkan secara kuat tentang isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Untuk membangun kredibilitas, meningkatkan akses pasar, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang, UMKM harus transparan dalam pelaporan ESG mereka.

Beberapa kendala terus membatasi transparansi dalam pelaporan ESG di perusahaan multinasional dan kecil (UMKM), seperti:

- a. Tidak ada peraturan yang mengatur pelaporan ESG untuk perusahaan kecil,
- b. tidak cukup banyak orang yang berpengetahuan tentang pelaporan keberlanjutan, dan
- c. orang-orang tidak memahami prinsip-prinsip ESG.

Menurut penelitian Yuliana dan Putra (2023), mayoritas UMKM di negara berkembang masih dalam tahap awal implementasi ESG, dengan pelaporan naratif dan tidak terstandarisasi masih menjadi norma.

Rantai Pasok UMKM dan Hubungannya dengan ESG

Khususnya di industri makanan, rantai pasokan UMKM sangat penting dalam memperkuat praktik berkelanjutan. Rantai pasokan berkelanjutan adalah rantai pasokan yang mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan di samping efisiensi ekonomi, menurut Chopra dan Meindl (2020). Usaha kecil dan menengah (UKM) di industri makanan dapat mencapai implementasi ESG dengan menggunakan sumber

daya lokal, mengurangi limbah produksi, dan memberikan lebih banyak kendali kepada pekerja lokal.

Rantai pasokan berkelanjutan di UMKM dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menghasilkan lebih banyak pendapatan, menurut Sari (2021). Rantai pasokan secara keseluruhan menghadapi hambatan dalam pelaporan dan implementasi ESG karena kurangnya sumber daya (seperti uang, teknologi, dan pengetahuan). Akibatnya, sangat penting untuk menilai keterbukaan pelaporan ESG untuk mengetahui seberapa besar operasi rantai pasokan UMKM mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan..

Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang pelaporan ESG dan keberlanjutan telah dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Misalnya, menurut Frias-Aceituno dkk. (2022), pelaporan ESG meningkatkan kepercayaan investor dan posisi perusahaan di pasar internasional. Di sisi lain, penelitian oleh Yuliana dan Putra (2023) menunjukkan bahwa UMKM di negara berkembang tidak sering melaporkan faktor ESG karena pemiliknya tidak cukup mengetahui tentang hal tersebut atau tidak memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan.

Pada saat yang sama, Sari (2021) meneliti implementasi ESG di kalangan UMKM Indonesia dan menemukan bahwa kesadaran akan keberlanjutan sedang meningkat, tetapi metode pelaporan masih cukup mendasar dan kurang terdokumentasi. Global Reporting Initiative (2023) menemukan bahwa lembaga keuangan dan pemerintah harus mendukung upaya untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa daerah-daerah lokal seperti Kabupaten Rantau Selatan sangat terpengaruh oleh kurangnya pengetahuan dan implementasi pelaporan ESG di kalangan pemilik dan operator UMKM.

III. METODE PENELITIAN

Studi kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi nyata seputar transparansi pelaporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam rantai pasokan pangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Rantau Selatan. Kami memilih metode ini karena menawarkan pandangan yang lebih holistik tentang tindakan, perspektif, dan realitas pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, dan dapat menempatkan fenomena tersebut dalam konteksnya. Peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap tentang metode pelaporan ESG di tingkat usaha kecil melalui penelitian kualitatif deskriptif, yang memungkinkan eksplorasi data yang fleksibel.

Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dipilih sebagai lokasi penelitian karena pesatnya perkembangan ekonomi di daerah tersebut yang berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor pangan. Banyaknya usaha makanan rumahan, produsen makanan olahan, dan pedagang kuliner di daerah ini berperan penting dalam rantai pasokan lokal, sehingga daerah ini dipilih dengan sengaja. Dengan menggunakan metode purposive sampling, peneliti memilih sepuluh UMKM pangan yang memenuhi kriteria berikut: telah beroperasi selama dua tahun atau lebih, mempekerjakan tenaga kerja lokal, memiliki kegiatan produksi yang berdampak pada lingkungan sekitar, dan bersedia memberikan informasi terbuka tentang usaha mereka.

Penelitian ini menggunakan sumber informasi primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer, kami mewawancarai UMKM makanan secara mendalam, mengamati operasional mereka secara langsung, dan meneliti catatan produksi, spreadsheet manajemen bahan baku, dan acara sosial yang disponsori perusahaan. Tinjauan literatur, laporan dari instansi pemerintah daerah, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi kebijakan tentang implementasi ESG dan pertumbuhan UMKM di Indonesia merupakan sumber data sekunder. Untuk lebih memahami temuan lapangan dan membandingkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, data sekunder digunakan.

Metode pengumpulan informasi meliputi pendokumentasian temuan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Para peneliti dapat menggali pandangan informan tentang prinsip-prinsip ESG dan proses pelaporan dengan lebih leluasa dalam wawancara semi-terstruktur. Observasi langsung terhadap produksi, pengelolaan limbah, dan dinamika antara manajemen, staf, dan masyarakat luas mencakup cakupan observasi. Foto, bukti pembelian bahan baku, dan rekaman acara sosial merupakan beberapa bukti nyata yang melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

Tiga langkah utama model Miles dan Huberman (1994) reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan diikuti dalam analisis data studi ini. Para peneliti mengumpulkan detail-detail penting yang relevan dengan penekanan studi selama fase reduksi data. Langkah selanjutnya dalam membuat data lebih mudah dipahami adalah dengan menyusunnya secara naratif dan memberikan label pada setiap kategori. Terakhir, kami memeriksa dan menarik kesimpulan berdasarkan teori ESG dan membandingkan data yang telah diproses dari berbagai sumber untuk memastikan temuan kami konsisten. Dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen, para peneliti mampu mendapatkan kesimpulan yang kredibel dan akuntabel sambil mempertahankan validitas data melalui penerapan pendekatan triangulasi sumber dan metode.

Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Studi ini tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan luas tentang UMKM di Indonesia secara keseluruhan karena ukuran sampelnya yang kecil dan cakupan geografis yang

terbatas (Kabupaten Rantau Selatan). Selain itu, saat ini belum ada kerangka kerja yang diterima secara universal untuk pelaporan ESG oleh UMKM; sehingga, penelitian ini bergantung pada tren saat ini dan masa depan di bidang tersebut. Meskipun demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan secara garis besar cara UMKM pangan lokal menerapkan prinsip-prinsip ESG secara lugas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di industri makanan di Kabupaten Rantau Selatan saat ini menerapkan dan memanfaatkan pelaporan ESG. Tingkat kesadaran umum terhadap konsep ESG tergolong baik, menurut wawancara mendalam dengan sepuluh UMKM dan observasi lapangan. Semakin banyak perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan jangka panjang sangat penting bagi kesuksesan mereka, baik secara finansial maupun dalam hal dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mengenai dampak lingkungan dari kegiatan industri mereka, sebagian besar UMKM telah menunjukkan kepedulian. Misalnya, enam dari sepuluh perusahaan memilah sampah organik mereka berdasarkan jenis makanan dan kemudian menggunakan sampah yang telah dipisahkan sebagai kompos atau pakan ternak. Beberapa orang memilih untuk menggunakan daun pisang atau kantong kertas sebagai pengganti plastik sekali pakai. Meskipun demikian, karena kurangnya sumber daya dan keahlian, beberapa perusahaan terus beroperasi tanpa metode yang konsisten untuk mengelola limbah cair mereka. Meskipun masih belum ada metode yang diterima secara universal, ada upaya nyata untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Mengenai aspek sosial, studi tersebut menemukan bahwa semua UMKM memiliki hubungan positif dengan staf dan masyarakat. Warga lokal dipekerjakan dan jam kerja fleksibel, yang sangat bagus untuk mahasiswa dan ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu. Selain itu, Anda mungkin menemukan beberapa perusahaan yang aktif terlibat dalam masyarakat dengan menawarkan bantuan makanan untuk acara yang diselenggarakan oleh gereja atau kelompok masyarakat lainnya. Meskipun laporan tanggung jawab sosial formal masih belum ada, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi di antara UMKM di Kabupaten Rantau Selatan.

Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih beroperasi tanpa struktur yang jelas dalam hal tata kelola. Masih belum ada rantai komando yang mapan di perusahaan, dan pemilik mengambil semua keputusan akhir secara pribadi. Menurut wawancara, hanya 30% UMKM yang menyimpan catatan dasar transaksi keuangan dan dokumentasi penggunaan bahan baku serta proses produksi mereka. Kurangnya struktur pelaporan formal menunjukkan bahwa kepercayaan dan kebiasaan masih memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola perusahaan. Namun

Evaluasi tingkat transparansi pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Rantau Selatan

demikian, para pemilik perusahaan ini tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterusterangan, transparansi, dan integritas.

Berdasarkan indikasi prosedur pelaporan dan berbagi informasi kepada pihak eksternal, tingkat transparansi dalam pelaporan ESG dinilai secara deskriptif menggunakan tiga kategori utama: tinggi, sedang, dan rendah. Menurut hasil tersebut, empat UMKM dinilai sedang, tiga tinggi, dan tiga rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dalam pelaporan ESG di kalangan UMKM pangan di Kabupaten Rantau Selatan adalah "cukup baik".

Tabel berikut merangkum tingkat keterbukaan dalam pelaporan ESG menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan:

Tabel 1. Tingkat Transparansi Pelaporan ESG

Kategori Aspek ESG	Indikator Penilaian	Capaian Rata-rata	Keterangan
Lingkungan (E)	Pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi	72%	Baik
Sosial (S)	Kesejahteraan pekerja, hubungan komunitas, kegiatan sosial	78%	Cukup Baik
Tata Kelola (G)	Transparansi keuangan, dokumentasi usaha, etika bisnis	65%	Sedang
Rata-rata Keseluruhan	-	71%	Cukup Baik

Source: Data diolah dari hasil wawancara dan observasi lapangan (2025).

Studi ini juga menemukan variasi dalam pemahaman ESG menurut lamanya perusahaan berdiri dan skala produksi, di samping data kuantitatif deskriptif yang disebutkan sebelumnya. Dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda, UMKM dengan sejarah yang lebih panjang (lebih dari lima tahun) cenderung lebih berkelanjutan dalam pemikiran dan tindakan mereka. Mereka juga lebih terbuka dengan detail tentang inisiatif lingkungan dan sosial mereka ketika berinteraksi dengan konsumen. Namun, UMKM yang baru muncul masih menganggap pelaporan ESG sebagai hal yang opsional.

Meskipun laporan tertulis yang terstandarisasi belum dikembangkan, temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM makanan di Kabupaten Rantau Selatan telah mulai memasukkan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam operasi sehari-hari mereka. Hambatan utama untuk pelaporan ESG formal adalah kurangnya waktu, uang, dan keahlian teknis. Kabar baiknya adalah adanya peningkatan dukungan untuk praktik perusahaan yang etis, yang merupakan pertanda baik untuk terciptanya sistem pelaporan yang efisien.

Pembahasan

Di antara UMKM makanan di Kabupaten Rantau Selatan, penelitian ini menemukan bahwa pelaporan ESG cukup terlaksana dengan baik dan

transparansinya tinggi. Meskipun kurangnya pelaporan atau dokumen resmi, studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku korporasi telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasi sehari-hari mereka. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman konsep ESG dapat diamati dalam interaksi sosial dengan lingkungan, pola manajemen perusahaan, dan aktivitas bisnis, bukan hanya dalam laporan tertulis.

Praktik UMKM di Rantau Selatan telah mulai menunjukkan beberapa tanda integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, namun belum sepenuhnya sesuai dengan teori ESG yang dikemukakan oleh Frias-Aceituno dkk. (2022). Hubungan kerja yang adil, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan limbah organik merupakan contoh fitur sosial; etika perusahaan dan transparansi pemangku kepentingan merupakan contoh aspek tata kelola; dan penggunaan sumber daya lokal merupakan contoh keberlanjutan lingkungan. Temuan penelitian ini memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa metrik ESG dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik berbagai jenis bisnis (Sari, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI, 2023), yang menekankan bahwa transparansi mencakup lebih dari sekadar pelaporan formal; transparansi juga membutuhkan akuntabilitas dan pengungkapan praktik. Hal ini sesuai dengan filosofi transparansi pelaporan. Komunikasi terbuka dengan klien, vendor, dan masyarakat luas merupakan komponen kunci transparansi dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun tidak menghasilkan laporan tertulis, UMKM di Rantau Selatan transparan dan jujur dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai topik-topik penting termasuk sumber bahan baku, metode produksi, dan keterlibatan sosial.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan Yuliana dan Putra (2023), yang menemukan bahwa kurangnya keahlian teknis dan sumber daya yang tidak memadai merupakan hambatan utama bagi pelaporan ESG di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian pula, di Rantau Selatan, sebagian besar pelaku korporasi masih bingung mengenai struktur dan standar pelaporan keberlanjutan. Namun, masih ada banyak antusiasme untuk menerapkan metode bisnis yang etis. Hal ini menunjukkan bahwa upaya di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas pelaporan ESG mungkin perlu difokuskan pada pelatihan dan dukungan teknis.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembangunan regional, baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Fakta bahwa UMKM sektor pangan memiliki pengetahuan ESG yang relatif tinggi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan mulai meresap di tingkat perusahaan kecil. Hasil ini memberikan dorongan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat berperan dalam transisi menuju ekonomi hijau, khususnya dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pelaporan berbasis komunitas yang disederhanakan. Wilayah ini dapat dilihat sebagai pelaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen pada kemakmuran bersama jika konsep ESG digunakan secara lokal.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ESG dalam konteks UMKM, karena sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan besar. Hasil dari lapangan menunjukkan bahwa UMKM tetap mempraktikkan keberlanjutan secara intuitif, dipengaruhi oleh norma sosial-budaya lokal, bahkan ketika tidak ada persyaratan resmi untuk melakukannya (laporan ESG). Pentingnya dedikasi perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, daripada kompleksitas laporan mereka, seharusnya menjadi metrik yang digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan.

Selain itu, studi ini menyoroti betapa pentingnya bagi lembaga-lembaga untuk membantu UMKM memahami dan menggunakan pelaporan ESG. Peran strategis utama bagi pemerintah daerah, bank, dan universitas adalah memperkenalkan UMKM pada gagasan pelaporan dasar yang relevan dengan karakteristik mereka. Praktik lokal dapat menjadi dasar penetapan kriteria pelaporan, yang pada gilirannya dapat mempercepat adopsi keberlanjutan di tingkat akar rumput. Selain itu, program pengembangan UMKM dapat memperoleh manfaat dari integrasi ESG. Dengan mengambil langkah-langkah ini, UMKM dapat meningkatkan keterbukaan pelaporan ESG mereka dan menjadi lebih kompetitif di pasar yang semakin menuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan dari bisnis.

Kesimpulannya, temuan studi ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) di Rantau Selatan umumnya sadar ESG dan bahwa keberlanjutan dalam bisnis skala kecil dimungkinkan dengan prosedur yang konsisten dan mudah. Nilai-nilai sosial dan etika lokal memberikan keuntungan tersendiri dalam mewujudkan praktik ESG berkelanjutan di tingkat UMKM, meskipun masih ada tantangan dengan pelaporan dan tata kelola formal.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian yang dilakukan di Distrik Rantau Selatan menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rantai pasokan makanan memiliki tingkat transparansi yang sangat baik dalam hal pelaporan ESG. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengadopsi pelaporan formal dan terstandarisasi, hasil ini menunjukkan bahwa UKM di wilayah tersebut menyadari pentingnya keberlanjutan perusahaan, terutama dalam dimensi sosial dan lingkungan. Sebagai contoh bagaimana prinsip-prinsip ESG dipraktikkan, perhatikan betapa telitinya bisnis dalam menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana mereka menangani limbah organik, seberapa banyak mereka menggunakan sumber daya lokal, dan bagaimana mereka memperlakukan karyawan dan masyarakat.

Dalam hal tata kelola, beberapa UKM masih menjaga kesederhanaan dan tidak memiliki sistem dokumen tertulis. Meskipun demikian, integritas dan keterbukaan tetap dijunjung tinggi, yang membangun kepercayaan di antara pelanggan, anggota

masyarakat, dan pemilik bisnis. Tanpa menunggu tindakan resmi pemerintah, ini menunjukkan bahwa pelaporan ESG di UKM dapat muncul secara organik berdasarkan nilai-nilai masyarakat setempat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang untuk pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan regional ketika konsep ESG diterapkan pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pelatihan dan pendampingan, konsep-konsep ini dapat dipertahankan, memungkinkan UMKM menjadi lebih kompetitif sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang terlokalisasi dan mudah diterapkan yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat dan lingkungan setempat dapat mengarah pada keberlanjutan perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah saran dapat diajukan untuk meningkatkan keterbukaan pelaporan ESG di sektor UMKM pangan.

- a) Untuk lebih memenuhi tuntutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah daerah harus menetapkan program pelatihan dan memberikan bantuan teknis tentang pelaporan ESG yang disederhanakan. Untuk pelaporan ESG berbasis komunitas, pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas dan bisnis lokal untuk menawarkan saran praktis.
- b) Pendokumentasian operasional perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan, seperti catatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan, kegiatan sosial, dan pengelolaan limbah, harus dimulai oleh UMKM. Dokumen dasar ini dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan dengan pelanggan dan mitra, dan juga dapat memberikan landasan untuk laporan keberlanjutan di masa mendatang.
- c) Temuan studi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan dan investor lokal harus memasukkan faktor ESG ketika mengambil keputusan pembiayaan. Sebagai tanda terima kasih atas praktik bisnis yang etis, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengadopsi prinsip keberlanjutan harus diberikan insentif atau akses yang lebih mudah ke pendanaan.
- d) Untuk memastikan bahwa akademisi dan peneliti masa depan memiliki gambaran lengkap tentang implementasi ESG di tingkat usaha kecil, disarankan agar penelitian diperluas untuk mencakup sektor UMKM lainnya seperti industri kreatif, pertanian, atau jasa. Metode kuantitatif untuk menilai dampak adopsi ESG terhadap kinerja sosial dan keuangan UMKM dapat dikembangkan melalui penelitian tambahan.

Temuan studi ini meletakkan dasar untuk penelitian masa depan di sektor UMKM, yang kemungkinan akan mengungkapkan bahwa pelaporan dan implementasi ESG adalah proses multi-pihak dan multi-tahap. Meningkatkan keterbukaan tingkat lokal

dalam pelaporan ESG membutuhkan komitmen yang signifikan, tetapi dapat memberikan landasan bagi ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chopra, S., & Meindl, P. (2020). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (8th ed.). Pearson Education.
- Frias-Aceituno, J. V., Rodríguez-Ariza, L., & García-Sánchez, I. M. (2022). The role of sustainability reporting in enhancing corporate transparency. *Journal of Cleaner Production*, 368(1), 133–145. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133145>
- Global Reporting Initiative (GRI). (2023). *GRI Standards for Sustainability Reporting*. Amsterdam: GRI Publications. Retrieved from <https://www.globalreporting.org>
- Indonesia, Media. (2025). *Prinsip ESG Jadi Standar Penting Komitmen Jaga Lingkungan*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/819632/prinsip-esg-jadi-standar-penting-komitmen-jaga-lingkungan>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sakti, Agung Dwi. (2024). *Penerapan ESG di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. <https://environment-indonesia.com/penerapan-esg-di-indonesia-tantangan-dan-harapan-2024/>
- Sari, D. (2021). Implementasi ESG pada UMKM di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 555–567. <https://doi.org/10.18202/jam2021.12.3.555>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Integrating the SDGs into Small and Medium Enterprises (SMEs): Practical Guide for Business Sustainability*. UNDP Publications.
- World Bank Group. (2020). *Sustainable Business Practices in Emerging Markets: Insights for SMEs*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliana, N., & Putra, R. (2023). ESG disclosure in small businesses: The case of developing economies. *Journal of Sustainability Studies*, 5(2), 89–103. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.089103>
- Zhu, Q., & Sarkis, J. (2016). Green supply chain management and environmental performance: Institutional pressures and managerial responses. *Journal of Environmental Management*, 180, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.05.003>